


LAPORAN PENELITIAN

PEMANFAATAN SPECIAL RIGHTS DAN FLEKSIBILITAS THE  
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)  
DALAM KEBIJAKAN DAGANG INDONESIA




Oleh : Triyana Yohanes, S.H.,MHum

 PERPUSTAKAAN	<b>MILIK PERPUSTAKAAN</b> <b>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</b>
Diterima	: 23 AUG 2008
Inventarisasi	: 170/FH/HO-8/En/2008
Klasifikasi	: 346.07598 Tri p8
Subyek	: Commercial law

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
JULI 2008

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN


1. a. Judul penelitian : Pemanfaatan Special Rights dan Fleksibilitas the General Agreement on Trade in Services (GATS) Dalam Kebijakan Dagang Indonesia  
b. Macam penelitian : Pustaka
2. Identitas peneliti  
Nama lengkap : Triyana Yohanes, S.H.,MHum  
Jenis kelamin : Pria  
Usia : 47 tahun  
Jabatan /Golongan : Lektor kepala / IV-b  
Fakultas : Hukum
3. Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Jangka waktu : enam bulan
5. Biaya yang diperlukan: Rp. 1150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
B. Bambang Riyanto, S.H.,MHum


Dekan Fakultas Hukum UAJY

  
B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,MHum

Yogyakarta, 31 Juli 2008  
Peneliti,

  
Triyana Y., S.H.,MHum

Ketua LPPM UAJY

  
Ir. B. Kristyanto, M.Eng.,Phd

01 AUG 2008

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan “hak-hak khusus” dan fleksibilitas yang bersifat menguntungkan bagi Negara-negara sedang berkembang yang diatur GATS dalam kebijakan dagang Indonesia. Sebagai Negara sedang berkembang semestinya Indonesia memanfaatkan secara baik hak-hak khusus dan fleksibilitas GATS, agar Indonesia tidak dirugikan dalam persaingan bebas di bidang perdagangan jasa, khususnya ketiga Indonesia berhadapan dengan Negara-negara maju. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemanfaatan hak-hak khusus dan fleksibilitas GATS dalam kebijakan dagang Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini tidak sempurna. Oleh karena itu peneliti terbuka terhadap segala kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas dari laporan penelitian ini.

Yogyakarta, 31 Juli 2008

Peneliti

## Abstrak

# **PEMANFAATAN SPECIAL RIGHTS DAN FLEKSIBILITAS THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM KEBIJAKAN DAGANG INDONESIA**

Oleh : Triyana Yohanes

Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat pada seluruh persetujuan WTO, termasuk GATS yang mengatur perdagangan di bidang jasa. GATS mengatur berbagai hak khusus (special rights) dan fleksibilitas tertentu yang ditujukan untuk memberi keuntungan negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Di bidang perdagangan jasa, Indonesia sebagai salah satu Negara sedang berkembang telah mengikatkan diri untuk berbagai sektor jasa sesuai hasil perundingan di Hongkong bulan Desember 2005.

Masalah pemanfaatan special rights dan fleksibilitas GATS dalam kaitannya dengan kebijakan dagang Indonesia dalam penelitian ini diteliti secara yuridis normative. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan secara baik special rights dan fleksibilitas GATS. Indonesia cenderung menerapkan prinsip-prinsip WTO seperti layaknya Negara maju. Hingga sekarang pemerintah Indonesia juga belum membuat Peraturan Pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa di Indonesia.

Kata kunci : *perdagangan jasa, special rights, fleksibilitas*

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perdagangan internasional di masa lalu, paling tidak hingga akhir abad ke-20, selalu diidentikkan dengan tukar-menukar barang antar Negara. Oleh karena itu pengaturan internasional di bidang perdagangan pada masa lalu juga hanya berkisar pada masalah perdagangan barang. Salah satu bukti mengenai hal tersebut adalah hasil konferensi internasional di Bretton Woods, memfokuskan terutama pada pengaturan perdagangan internasional di bidang barang. Konferensi internasional di Bretton Woods, NH, Amerika Serikat diselenggarakan tahun 1944 guna menata hubungan ekonomi dan perdagangan internasional yang hancur karena terjadinya Perang Dunia Kedua. Konferensi tersebut menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods. Yang sering disebut sebagai lembaga-lembaga ekonomi Bretton Woods tersebut meliputi :

1. *the International Monetary Fund (IMF)*,
2. *the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank = Bank Dunia)*, dan
3. *the General Agreement on Tariff and Trade, 1947 (GATT 1947)*.

Pengaturan hubungan perdagangan internasional pasca Perang Dunia II mula-mula akan diatur berdasarkan Piagam the International Trade Organization (ITO). Akan tetapi Piagam Havana ternyata kemudian gagal untuk diratifikasi oleh Negara-negara peserta perundingan, termasuk Amerika Serikat<sup>1</sup>. Kebetulan pada waktu Piagam ITO dirancang,

---

<sup>1</sup> Lihat Oentoeng Soeropati, *Hukum Dagang Internasional*, Satya Wacana, 1999, hlm. 44

pada waktu yang bersamaan dirancang pula GATT 1947.<sup>2</sup> Sebagai ganti tidak berhasilnya pemberlakuan Piagam ITO, kemudian GATT 1947 diberlakukan, sehingga pengaturan perdagangan internasional pasca Perang Dunia II mengandalkan pada GATT 1947. GATT 1947 tersebut hanya berkaitan dengan perdagangan barang. Dalam prakteknya selain berfungsi sebagai perangkat peraturan internasional di bidang barang, GATT 1947 juga melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. sebagai forum perundingan,
2. sebagai organisasi perdagangan internasional dan
3. sebagai forum penyelesaian sengketa dagang antar Negara.

Pengaturan perdagangan internasional yang hanya terfokus pada perdagangan antar negara di bidang barang berlangsung hingga tahun 1994. Pada tahun 1980-an Negara-negara mulai menyadari bahwa perdagangan internasional yang perlu diatur tidak hanya menyangkut perdagangan barang. Bidang-bidang lain seperti penyediaan jasa, Hak Atas Karya Intelektual (HaKI) juga perlu diatur.

Perdagangan internasional di bidang jasa pada akhir abad 20 mengalami peningkatan yang signifikan dan memegang peran penting dalam perekonomian Negara-negara. Berbagai bidang jasa seperti jasa konsultasi perusahaan, manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa telekomunikasi dan sebagainya sekarang ini memegang peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan perekonomian modern. Oleh karena itu beberapa Negara, khususnya Negara-negara maju, berpandangan bahwa perdagangan jasa harus diatur dalam perjanjian internasional.

Sebagai realisasi dari upaya pengaturan perdagangan internasional di bidang lain selain perdagangan barang, maka bidang penyediaan jasa, dan HaKI, dimasukkan sebagai

---

<sup>2</sup> Lihat Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 94 - 95

agenda yang dirundingan dalam Perundingan GATT Putaran Uruguay. Perundingan GATT putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga tahun 1994 menghasilkan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Persetujuan WTO tersebut dilampiri dengan berbagai annex sebagai berikut :

1. *Annex I :*

*Annex IA : Multilateral Agreements on Trade in Goods*

- a. *General Agreement on Tariff and Trade 1994*
- b. *Agreement on Agriculture,*
- c. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,*
- d. *Agreement on Textiles and Clothing,*
- e. *Agreement on Technical Barriers to Trade,*
- f. *Agreement Trade-related Investment Measures,*
- g. *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994*
- h. *Agreement of Article VII of the GATT 1994,*
- i. *Agreement on Preshipment Inspection,*
- j. *Agreement on Rule of Origin,*
- k. *Agreement on Import Licensing Prtcedures,*
- l. *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures,*
- m. *Agreement on Safeguard.*

*Annex IB : General Agreement on Trade in Services and Annexes,*

*Annex IC : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

2. *Annex II : Understanding on Rules and Procedures Governing the Settltment of Disputes*

3. *Annex III : Trade Policy Review Mechanism*

4. *Annex IV : empat buah Plurilateral Trade Agreements*

Dengan dibentuknya WTO, peran GATT sebagai forum perundingan, forum penyelesaian sengketa dan sebagai organisasi internasional digantikan oleh WTO. Di bawah WTO, GATT masih dipergunakan sebagai perangkat aturan utama di bidang perdagangan barang.

Berbeda dengan GATT 1947 yang hanya mengatur perdagangan barang, persetujuan WTO meliputi pula perdagangan di bidang jasa dan aspek Hak Akan Karya Intelektual (HaKI). Khusus di bidang perdagangan jasa di bawah WTO diatur melalui Annex I B di bawah judul Agreement on Trade in Services and Annexes.

Pengaturan perdagangan jasa berdasar GATS sering dikatakan paling rileks dan fleksibel jika dibandingkan dengan persetujuan-persetujuan WTO lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat kemajuan teknologi Negara-negara maju dan Negara-negara-negara sedang berkembang, sehingga Negara-negara maju jauh lebih siap untuk berkompetisi dibanding Negara-negara sedang berkembang. Liberalisasi perdagangan jasa dikhawatirkan hanya akan memberi keuntungan Negara-negara maju dan merugikan Negara-negara sedang berkembang. Industri jasa Negara-negara maju akan mudah mengalahkan industri jasa Negara-negara sedang berkembang dalam persaingan bebas.

Disamping pengaturan yang sangat fleksibel, GATS juga mengatur tentang perlakuan istimewa Negara-negara sedang berkembang dalam hal perdagangan jasa. Pemberian perlakuan istimewa ini dimaksudkan untuk melindungi industri jasa Negara-negara sedang berkembang dalam persaingan dengan industri jasa Negara-negara maju



serta guna meningkatkan kemampuan atau daya industri jasa Negara-negara sedang berkembang.

Indonesia merupakan salah satu Negara sedang berkembang anggota WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dilakukan melalui ratifikasi Indonesia atas Persetujuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai konsekwensinya Indonesia terikat pada seluruh persetujuan WTO, termasuk GATS. Konsekwensi lebih lanjut dari keterikatan Indonesia atas persetujuan-persetujuan WTO adalah Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dagangnya dengan kaidah-kaidah WTO. Sampai sekarang ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dagang yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan WTO tersebut. Namun seringkali kebijakan dagang tersebut dikritik karena terlalu bersifat liberalistic karena hanya mendasarkan pada prinsip dasar WTO yakni librealisasi ekonomi dunia. Kebijakan dagang yang liberalistic dapat menyebabkan terancamnya industri-industri Indonesia yang masih lemah, karena melalui kebijakan dagang yang bersifat liberal berbagai alat proteksi bagi pelaku ekonomi lemah dihapuskan. Akibat lebih lanjut yakni perekonomian Indonesia dapat dirugikan karena industri-industri kecil dan lemah di Indonesia akan tersingkir dalam persaingan bebas. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan dagang ini, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan hak-hak khusus (*special rights*) Negara-negara sedang berkembang dan berbagai kemudahan (*fleksibilitas*) yang diberikan untuk keuntungan Negara-negara sedang berkembang.

Di bidang perdagangan jasa, Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya untuk memasukkan beberapa sector jasa untuk dimasukkan dalam liberalisasi perdagangan jasa di bawah GATS. Sebagai salah satu pelaksanaannya, Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007. Karena merupakan Negara

sedang berkembang, Pemerintah Indonesia perlu memanfaatkan pengaturan tentang hak istimewa dan fleksibilitas GATS dalam membuat kebijakan dagang, khususnya di bidang perdagangan jasa:



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Mayoritas anggota WTO adalah Negara-negara sedang berkembang. Dalam persaingan bebas di bidang ekonomi Negara-negara sedang berkembang tentu tidak memiliki kekuatan yang sama disbanding Negara-negara maju. Oleh karena itu dalam persaingan bebas tersebut Negara-negara sedang berkembang memerlukan berbagai alat proteksi. Alat proteksi ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing Negara-negara sedang berkembang, sehingga diharapkan setelah periode waktu tertentu Negara-negara sedang berkembang anggota WTO tersebut akan memiliki daya saing yang sama dengan Negara-negara maju. Persaingan bebas di bidang ekonomi tidak akan adil jika tidak ada kemampuan ekonomi yang sama antar para pelaku ekonomi tersebut.

Dalam persetujuan-persetujuan WTO diatur berbagai alat proteksi yang ditujukan untuk melindungi sementara waktu ekonomi Negara-negara sedang berkembang anggota WTO setelah berlakunya liberalisasi ekonomi di bawah WTO. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari Perundingan GATT Putaran Uruquay (yang menghasilkan WTO) yakni untuk menciptakan perdagangan bebas dunia yang memberi keuntungan Negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu perdagangan bebas di bawah WTO tidak boleh ada yang kalah dan yang menang, tetapi perdagangan bebas tersebut memberi keuntungan kepada semua Negara baik Negara-negara maju maupun Negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu Negara-negara sedang berkembang perlu diberi hak-hak istimewa atau kelonggaran-kelonggaran dalam melaksanakan persetujuan WTO agar

tidak dirugikan dalam perdagangan bebas WTO akibat industri mereka kalah bersaing dengan industri Negara-negara maju.

Hak-hak istimewa (special rights) dan kelonggaran dalam menerapkan persetujuan-persetujuan WTO untuk kepentingan Negara-negara sedang berkembang juga diatur dalam GATS. Seperti telah disebutkan di muka GATS merupakan salah satu persetujuan WTO yang khusus mengatur tentang perdagangan jasa. Dalam pembukaan GATS, perdagangan jasa dimasukkan dalam salah satu sector yang diatur dalam persetujuan-persetujuan WTO dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. karena begitu pentingnya peran perdagangan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia,
2. perlunya diterapkan prinsip-prinsip hukum multilateral terhadap perdagangan jasa yang berorientasi terhadap prinsip transparansi, liberalisasi yang progresif sebagai suatu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
3. untuk meningkatkan kepentingan dari Negara-negara peserta WTO dengan menjamin terciptanya keseimbangan dari hak dan kewajibannya, dengan tetap memberikan penghargaan pada kepentingan Negara masing-masing,
4. untuk meningkatkan kepentingan Negara-negara peserta WTO dengan perhatian khusus kepada Negara-negara sedang berkembang,
5. meningkatkan partisipasi Negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan jasa internasional dengan memperkuat kapasitas, efisiensi, dan kompetitif dari jasa domestik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat pula Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum WTO)*, Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm 83 – 84..

Berkaitan dengan hak istimewa (special rights) Negara-negara sedang berkembang, dalam Pembukaan GATS juga dinyatakan tentang pengakuan atas kebutuhan istimewa bagi Negara-negara sedang berkembang melaksanakan hak untuk mengatur dan memperkenalkan peraturan baru tentang penyediaan jasa-jasa dalam wilayahnya sebagai upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan, dan berkeinginan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi Negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan di bidang jasa dan perluasan ekport mereka di bidang jasa antara lain melalui peningkatan kapasitas domestik. Selanjutnya Special rights Negara-negara sedang berkembang anggota WTO dalam GATS diatur melalui Pasal III ayat 4), Pasal III ayat 1-3, Pasal V ayat 3, Pasal XV ayat 1, Pasal XIX ayat 2, Pasal dan Pasal XXVI ayat 2.

### **BAB III**

#### **MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah pemanfaatan special rights dan fleksibilitas the General Agreement on Trade in Services dalam kebijakan dagang Indonesia, khususnya yang menyangkut perdagangan jasa ?”

##### **E. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pemberian special rights dan fleksibilitas GATS dalam kebijakan dagang Indonesia, khususnya di bidang perdagangan jasa.

##### **F. Manfaat hasil penelitian**

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat kebijakan dagang di Indonesia, khususnya yang menyangkut perdagangan jasa, sehingga Indonesia tidak dirugikan dalam liberalisasi perdagangan jasa berdasar GATS, sebaliknya Indonesia dapat mengambil keuntungan darinya.

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan Hukum Ekonomi Internasional.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normative, di mana dalam penelitian data yang dikumpulkan terutama berupa peraturan-peraturan hukum maupun dokumen-dokumen hukum.

#### **B. Metode pengumpulan data**

Data dalam penelitian akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui mempelajari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer meliputi segala macam peraturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan jasa berdasar GATS dan kebijakan perdagangan jasa Indonesia sebagai akibat keikutsertaan Indonesia dalam WTO. Bahan hukum sekunder meliputi segala teori dan pandangan para ahli mengenai topic penelitian baik yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, majalah, surat kabar maupun internet.

#### **C. Metode analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis komparatif dan kualitatif. Dari analisis data kemudian akan ditarik kesimpulan dan dikemukakan saran-saran.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Prinsip-prinsip pengaturan perdagangan internasional di bawah WTO.

WTO dibentuk berdasar hasil perundingan GATT Putaran Uruguay yang ditandatangani di Marakesh, Marokko tahun 1994 dan mulai berlaku efektif 1 Januari 1995. Keberhasilan pembentukan WTO adalah merupakan realisasi cita-cita lama dari masyarakat internasional untuk memiliki sebuah organisasi perdagangan global, yakni ITO yang gagal dibentuk pasca Perang Dunia II.

WTO merupakan organisasi internasional publik yang anggotanya terbuka untuk semua Negara di dunia ini. Kini anggota WTO berjumlah 149 negara, sehingga hampir semua Negara di dunia menjadi anggota WTO.<sup>4</sup> WTO sekarang ini merupakan satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang bersifat multilateral. Melalui WTO dirumuskan kebijakan-kebijakan dagang internasional dan melalui WTO pula kebijakan negara-negara anggotanya ditinjau agar sesuai dengan kebijakan WTO. Disamping sebagai forum negosiasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dagang internasional, WTO juga menyediakan mekanisme dan forum penyelesaian sengketa.

Tidak seperti pengaturan sebelumnya (GATT 1947) yang hanya berkaitan dengan perdagangan, WTO mengatur hampir semua sektor ekonomi yang diperdagangkan oleh masyarakat internasional. Selain berkaitan dengan perdagangan barang, di bawah persetujuan-persetujuan WTO diatur pula perdagangan bidang-bidang lain seperti perdagangan jasa, investasi, aspek HKI (teknologi) dan sebagainya. Dikatakan oleh oleh

---

<sup>4</sup> Bandingkan dengan jumlah anggota PBB yang terdiri dari 191 negara.



Sofian Effendi bahwa dalam tipologi yang digunakan oleh para ekonom kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam tiga sektor. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan *utilities*. Sektor tertier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*) dan benda simbolik (*information and communication services*).<sup>5</sup> Jika dikaitkan dengan pembagian kegiatan usaha tersebut, maka WTO berusaha untuk mengatur seluruh kegiatan usaha tersebut dalam lingkup global.

Seperti dikatakan dalam Bab I bahwa WTO sebetulnya merupakan penerus dari GATT 1947. Sering dikatakan bahwa WTO adalah GATT yang diperluas dan disempurnakan (WTO = GATT Plus). Di bawah persetujuan WTO, GATT tidak dihapuskan, tetapi masih dipertahankan sebagai peraturan payung dari pengaturan perdagangan barang (disebut GATT 1994). Pada prinsipnya pengaturan perdagangan internasional di bawah WTO masih mengandalkan pada prinsip-prinsip GATT. Adapun prinsip-prinsip pokok dari pengaturan perdagangan internasional di bawah persetujuan-persetujuan WTO adalah sebagai berikut:

1. **Prinsip *free trade* (liberalisasi)**. Berdasar prinsip *free trade* atau perdagangan bebas, WTO mengupayakan perdagangan internasional berjalan seliberal mungkin. WTO mengupayakan penghapusan semua hambatan dalam perdagangan internasional baik yang berupa pajak masuk ( *tariff barriers to trade* ) maupun hambatan bukan pajak (*non-tariff barriers to trade*)

---

<sup>5</sup> Sofian Effendi, GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi, makalah pada diskusi : Neo-imperialisme modern dalam Pendidikan, BEM KM UGM, 22 September 2005, hlm. 1

2. **Prinsip the Most-Favoured-Nation (MFN).** Berdasar prinsip MFN perlakuan yang diberikan oleh suatu anggota WTO terhadap anggota WTO lainnya yang bersifat menguntungkan, maka perlakuan tersebut berlaku untuk seluruh anggota WTO. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa semua anggota WTO wajib memperlakukan anggota-anggota WTO lainnya secara sama. Oleh karena itu prinsip MFN sering juga disebut sebagai prinsip non-diskriminasi. Prinsip MFN diatur dalam Pasal I GATT.
3. **Prinsip National Treatment.** Berdasar prinsip National Treatment, maka seluruh anggota WTO wajib memberi perlakuan yang sama antara produk import dan produk domestik (lokal) yang dijual ke dalam pasaran dalam negeri Negara anggota tersebut. Perlakuan yang sama tersebut misalnya dalam hal perpajakan, persyaratan standar kualitas, persyaratan pendistribusian dan sebagainya.
4. **Prinsip perlindungan melalui pajak (tariff) dan larangan perlindungan melalui upaya non-tariff.** Pada prinsipnya Negara-negara anggota WTO masih diperkenankan untuk melindungi produk domestik mereka melalui pemajakan atas barang-barang import. Rasionya adalah perlindungan melalui pajak masih dinilai transparan, masih dalam konteks mekanisme harga dan tidak menyebabkan “market distorsion”. Namun demikian tariff yang diterapkan oleh anggota-anggota WTO tidak boleh menyimpang dari apa yang telah disetujui dalam rangka perundingan tariff. Hasil perundingan tariff ini menjadi lampiran yang tidak terpisah dari persetujuan WTO (Pasal II GATT 1994), sehingga mengikat Negara-negara anggota WTO.

Perlindungan terhadap produk domestik melalui upaya-upaya bukan pajak (non-tariff) pada prinsipnya dilarang, karena sifatnya tidak transparan dan dapat menyebabkan “market distortion”.

5. **Prinsip larangan pembatasan kuantitatif.** Anggota-anggota WTO dilarang melakukan/mengambil kebijakan dagang yang dapat mempengaruhi jumlah produk yang diekspor maupun diimport sebagai upaya melindungi kepentingan ekonominya. Contoh kebijakan yang dilarang misalnya pembatasan kuota ekspor/import, pembatasan lisensi ekspor/import, larangan sama sekali ekspor/import, dan sebagainya.<sup>6</sup>
6. **Prinsip transparansi.** Berdasar prinsip transparansi, maka setiap regulasi dan kebijakan dagang yang diambil Negara-negara anggota WTO harus diumumkan dan dapat diketahui oleh para pelaku ekonomi (eksportir/importir) dari Negara-negara anggota lainnya.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip GATT/WTO tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh Negara-negara anggota WTO. Namun demikian persetujuan-persetujuan WTO juga mengatur kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut dalam keadaan tertentu. Penyimpangan tersebut merupakan pengecualian dari pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan (pengecualian) dalam pemberlakuan prinsip-prinsip GATT/WTO tersebut adalah dalam kaitannya dengan pemberian hak-hak khusus yang menguntungkan (special rights) bagi negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal XI GATT 1994.

<sup>7</sup> Lihat Pasal VI GATT 1994

## **B. Pengaturan *special rights* Negara-negara sedang berkembang anggota WTO**

Pada prinsipnya aturan-aturan perdagangan bebas berdasar Persetujuan WTO mendasarkan pada ajaran faham ekonomi liberal. Sering dikatakan bahwa system ekonomi yang dijalankan WTO saat ini merupakan sistem ekonomi neoliberal (liberalisme baru). Sistem ekonomi liberal berakar pada gagasan Adam Smith (1723 - 1790) dan kemudian dikembangkan oleh David Ricardo (1772 – 1823) dan oleh Herbert Spencer (1820 – 1903).<sup>8</sup> Berdasar faham ekonomi liberal maka setiap pelaku ekonomi mempunyai kebebasan berusaha dan bersaing secara bebas. Demikian pula dalam persaingan bebas dalam perekonomian internasional, maka setiap Negara mempunyai kebebasan untuk bersaing. Sebagai konsekwensinya, dalam persaingan bebas ekonomi global, maka setiap Negara harus dapat merebut peluang untuk menjadi pemenang. Negara yang tidak siap untuk bersaing akan dapat tersingkir dalam persaingan global di bidang ekonomi tersebut dan akhirnya hanya akan menjadi pecundang yang mengalami banyak kerugian ekonomi. Tersingkirnya Negara yang kalah dalam persaingan bebas di bidang ekonomi merupakan salah satu dampak negatif yang dapat muncul dalam persaingan bebas di bidang ekonomi.

Menyadari kemungkinan terjadinya dampak negative seperti di atas, maka sejak perundingan Putaran Uruguay 1986 - 1994, masalah perlindungan kepentingan Negara-negara ekonomi lemah (Negara-negara sedang berkembang) telah diperhatikan. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Putaran

---

<sup>8</sup> Lihat Triyana Yohanes, *Liberalisasi Ekonomi Dunia, Pembangunan dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Justitia et Pax, Volume 26, No. 2 Desember 2006, hlm. 160.

Perundingan Uruguay adalah untuk menciptakan perdagangan bebas dunia yang memberi keuntungan kepada Negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu Negara-negara sedang berkembang harus diberi alat protektif dalam persaingan bebas di bidang ekonomi dunia, khususnya jika berhadapan dengan Negara-negara maju.

Pengaturan bagi perlakuan khusus yang bersifat menguntungkan bagi Negara-negara sedang berkembang sudah diberikan berdasar GATT 1947 yang merupakan pendahulu dari WTO.<sup>9</sup> Pengaturan khusus yang bersifat menguntungkan bagi Negara-negara sedang berkembang tersebut kemudian semakin diperkuat berdasar persetujuan-persetujuan WTO.

Untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang, maka WTO mengatur berbagai alat perlindungan seperti :

1. pemberlakuan ketentuan WTO yang lebih longgar bagi Negara-negara sedang berkembang
2. pemberian hak-hak istimewa kepada Negara-negara sedang berkembang dalam hampir seluruh persetujuan WTO
3. bantuan ekonomi kepada Negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

Prof. Dr. WD. Verwey mengidentifikasikan berbagai hak khusus berdasarkan persetujuan WTO sebagai berikut :

1. full subjective preferential rights
2. subjective preferential rights whose implementability depend on the occurrence of a specific current event

---

<sup>9</sup> Lihat Bagian ke-4 GATT (Pasal XXXVI sampai dengan Pasal XVIII) yang ditambahkan pada GATT 1947 pada tahun 1965. Pada tahun 1979 di bawah GATT 1947 juga disetujui tentang "enabling clause" pada tahun 1979, yang disebut sebagai "putusan mengenai perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan, resiprositas dan partisipasi secara penuh Negara-negara sedang berkembang. Enabling Clause digunakan juga sebagai dasar pemberian status "generalized system of preference" dalam hubungan dagang antara Negara-negara sedang berkembang dengan Negara-negara maju.

3. subjective preferential rights whose implementability depend on the subsequent identification of secondary terms or conditions,
4. specific preferential entitlements whose implementability is uncertain to the extent that developed countries members are merely committed to pursue their implementation as far as they consider this practicable
5. specific preferential entitlements whose implementability is even more uncertain to the extent that developed country members are merely required to facilitate or promote the desired result
6. abstract preferential entitlements whose implementability is doubtful as a result of the circumstance that the preferential treatment to be granted is not specified
7. abstract preferential entitlement whose implementability is further limited by the provision that the preferential treatment to be granted must first be agreed upon “on mutually agreed terms”
8. preferential entitlements whose implementability can hardly be ensured as a result of the provision that the treatment in question will be granted to developing countries “in Particular”
9. preferential entitlements whose implementability is not at all ensured as a result of the provision that developed countries members merely should – instead of “shall” – grant the treatment required
10. preferential entitlements whose implementability can not be ensured as a result of the provision that developed countries members are merely entitled, but not obliged, to grant the treatment in question,
11. preferential entitlements which merely provide developing countries with privilege to apply for a specific preferential treatment

12. preferential entitlements whose implementability entirely depends on the interpretation by the developed country members of the stipulation that, in the course of specific action, they merely shall take the interests of developing country into account.<sup>10</sup>

Pengurutan berdasar nomor seperti tersebut dilakukan oleh W.D. Verwey berdasarkan urutan hak khusus yang paling kuat ke yang lebih lemah dan yang terakhir hak yang paling lemah yang dimiliki Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Misalnya, hak nomor 1, yakni *full subjective preferential rights*, merupakan hak yang dimiliki secara khusus oleh Negara-negara sedang berkembang dan hak khusus tersebut secara otomatis dapat dinikmati oleh Negara-negara sedang berkembang tanpa harus digantungkan pada persyaratan tertentu. Sedangkan nomor 12, yakni *preferential entitlements whose implementability entirely depends on the interpretation by developed country members of the stipulation that, in the course of specific action, they merely shall take the interests of developing country into account*, merupakan hak istimewa yang terlemah. Hak khusus/istimewa tersebut pelaksanaannya seluruhnya tergantung dari penafsiran Negara maju anggota WTO berdasar syarat tersebut, selama tindakan khusus tertentu, semata-mata mengingat kepentingan Negara-negara sedang berkembang.<sup>11</sup>

Disamping melalui pemberian hak-hak khusus (*special rights*), untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) dan Negara tertinggal (*least developed countries members of the WTO*) dalam organisasi WTO juga dibentuk Komite Khusus yang menangani masalah-masalah yang berkenaan

<sup>10</sup> Lihat W.D. Verwey, *the Preferential Status of Developing Countries in International Trade Law after the Uruguay Round*, makalah tidak dipublikasikan, hlm. 6 – 13.

<sup>11</sup> Lihat Triyana Yohanes, *Pengaturan Special Rights Negara Negara sedang berkembang dalam Persetujuan WTO*, laporan penelitian, Juli 2006, hlm.35

dengan Negara-negara sedang berkembang dan Negara-negara tertinggal, yakni WTO *Committee on Trade and Development* dan *Sub-Committee on Least Developed Countries*.

Tugas Komisi Perdagangan dan Pembangunan WTO antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan kerjasama teknis
2. Penanganan terhadap kedudukan khusus dari Negara-negara tertinggal
3. Tata cara pelaksanaan ketentuan yang berkaitan dengan Negara-negara sedang berkembang
4. Meningkatkan partisipasi Negara sedang berkembang dalam perdagangan multilateral.

Dalam hubungan pelaksanaan tugas dari Komisi Perdagangan dan Pembangunan tersebut pada tahun 1996 WTO telah menyiapkan kertas kerja yang berjudul *Participation of Developing Countries in the World Trade : Overview of Major Trends and Underlying Factors*. Dalam kertas kerja tersebut antara lain diungkapkan beberapa faktor yang penting untuk meningkatkan partisipasi Negara berkembang dalam system perdagangan global, yaitu sebagai berikut :

1. Akses ke pasar luar negeri,
2. Akses ke aliran modal,
3. Kebijakan perdagangan nasional,
4. Partisipasi Negara sedang berkembang dalam WTO.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat Munir Fuady, op.cit., hlm. 108.



Meskipun berbagai alat proteksi bagi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang telah diberikan berdasar persetujuan-persetujuan WTO, dalam kenyataannya globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia di bawah persetujuan WTO ternyata tidak membuat keadaan ekonomi Negara-negara sedang berkembang segera meningkat. Bahkan akibat kalah bersaing dengan industri Negara-negara maju, banyak industri Negara-negara sedang berkembang tersingkir, sehingga menyebabkan memburuknya ekonomi Negara-negara sedang berkembang. Menurut Laporan Nomura Research Institute dalam Asia Pacific Outlook 1996, ada peningkatan ketergantungan pertumbuhan ekonomi Negara-negara sedang berkembang di Asia Pacific pada Negara-negara maju pada tahun-tahun awal setelah ditandatanganinya Persetujuan WTO 1994. Padahal ketergantungan tersebut sebelum tahun 1994 telah menurun.<sup>13</sup> Globalisasi dan liberalisasi yang telah berjalan dalam kenyataannya juga telah menimbulkan pro dan kontra. Liberalisasi ekonomi yang menuntut kompetisi tinggi membuat banyak penduduk bumi, khususnya yang menghuni Negara-negara sedang berkembang akan semakin tersingkir.

Indonesia termasuk sebuah Negara sedang berkembang yang belum dapat mengambil keuntungan maksimal dari liberalisasi perdagangan dunia di bawah WTO. Bahkan di era WTO dapat dikatakan rakyat Indonesia menjadi berkurang kesejahteraan ekonominya. Hal ini ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1998, banyaknya industri lokal kalah bersaing dengan penanam modal asing sehingga harus gulung tikar, meningkatnya jumlah angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah Indonesia hingga sekarang ini sering dinilai terlalu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan kaum liberalis kapitalis dari luar negeri dan kurang memperhatikan perlindungan kepentingan ekonomi

---

<sup>13</sup> Lihat ,Ibid., hlm. 163

nasional. Hal ini nampak misalnya dalam kebijakan di bidang HaKI yang terlalu menonjolkan perlindungan pemilik hak, perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri dan modal asing berdasar Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pencabutan berbagai subsidi industri lokal dan privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang akhirnya malah banyak yang jatuh ke tangan pengusaha dari luar negeri.

Memang sebagai konsekwensi ratifikasi<sup>14</sup> Indonesia terhadap persetujuan-persetujuan WTO, Indonesia wajib mengharmonisasikan hukum nasionalnya dengan persetujuan-persetujuan WTO. Namun penyesuaian peraturan hukum di bidang ekonomi tersebut tidak boleh terlalu mengikuti keinginan kekuatan-kekuatan liberali kapitalis dari luar negeri mengingat Indonesia merupakan Negara sedang berkembang yang tentu saja belum dapat bersaing secara bebas di forum ekonomi dunia, khususnya ketika berhadapan dengan Negara-negara maju. Dalam pembuatan kebijakan ekonomi Indonesia harus disesuaikan dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi Indonesia berdasar Pasal 33 UUD 1945. Untuk melindungi kepentingan ekonomi Indonesia, maka pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan ekonomi dalam rangka pelaksanaan persetujuan WTO harus semaksimal mungkin memanfaatkan ketentuan-ketentuan khusus persetujuan WTO yang dibuat untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang. Dalam hal-hal tertentu untuk dapat menikmati "special rights" persetujuan WTO, pemerintah Negara-negara sedang berkembang dituntut pro-aktif dan tidak boleh hanya menggantungkan belas kasihan Negara-negara maju anggota WTO.

---

<sup>14</sup> Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1994.

### C. Special rights negara- negara sedang berkembang dan fleksibilitas GATS

Seperti telah disebutkan di muka bahwa salah satu persetujuan WTO menyangkut liberalisasi bidang jasa berdasar GATS. Dalam struktur organisasi WTO juga dibentuk Dewan khusus yang menangani masalah perdagangan jasa, yakni *the Council for Trade in Services*. Tugas utama dari Dewan WTO untuk Perdagangan Jasa adalah bekerja untuk pelaksanaan GATS dan memberi laporan kepada Dewan Umum WTO. Dewan WTO untuk Perdagangan Jasa di bagi ke dalam :

1. *Committee on Trade in Financial Services,*
2. *Committee on Specific Commitments,*
3. *Working Party on Domestic Regulation,*
4. *Working Party on General Agreement on Trade in Services (GATS) Rules.*

Dewan WTO untuk Perdagangan Jasa juga memiliki *subsidiary bodies*, antara lain berupa :

1. *Professional Services,*
2. *GATS Rules*
3. *Specific Commitment.*<sup>15</sup>

WTO telah mengidentifikasikan 4 mode penyediaan jasa dalam rangka perdagangan jasa di bawah GATS sebagai berikut :1). *Cross-border supply*, 2). *Consumption abroad*, 3). *Commercial presence* dan 4). *Presence of natural persons*. Dalam hal liberalisasi perdagangan jasa sering dikatakan bahwa Negara-negara maju anggota WTO memiliki kepentingan yang bertolak belakang dengan Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Negara-negara maju memiliki sarana dan prasarana, sumber daya manusia, teknologi yang jauh lebih unggul dibandingkan Negara-negara sedang berkembang.

<sup>15</sup> Lihat , Fuady Munir, *op.cit.*, hlm 44 dan 50

Dengan demikian dapat diprediksikan industri jasa Negara-negara maju akan dapat mengambil banyak manfaat dalam perdagangan bebas di bidang jasa, karena dengan keunggulan yang mereka miliki, industri jasa dari Negara-negara maju akan mudah menang dalam persaingan bebas. Sebaliknya karena Negara-negara sedang berkembang umumnya memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang lebih rendah, kemampuan teknologi yang rendah, sarana dan prasarana yang kurang, dapat dipastikan industri jasa Negara-negara sedang berkembang banyak yang akan tersingkir dalam persaingan bebas.

Seperti telah disebutkan di muka bahwa pengaturan perdagangan jasa di bawah WTO harus dilandasi prinsip keuntungan bagi seluruh anggota WTO, khususnya anggota-anggota WTO yang masih dalam kategori sebagai Negara sedang berkembang dan miskin. Seperti dikatakan oleh Bernard Hoeman cs bahwa :

Developing countries need to ensure that multilateral rules and commitments on trade in services contribute to economically rational policy making at the national and international levels. A necessary condition from benefiting from membership in the WTO is the development of a national strategy for the liberalization of domestic market, proactive effort to open foreign market for services, and the promotion of multilateral rules that enhance development prospects.<sup>16</sup>

Karena adanya kesenjangan antara Negara-negara maju dan Negara-negara sedang berkembang dalam tingkat kemajuan industri jasa mereka, maka perdagangan jasa diatur dalam GATS dengan berbagai fleksibilitas. Disamping itu prinsip-prinsip WTO dalam hal-hal tertentu dapat disimpangi (tidak diterapkan secara ketat). Salah satu contoh, adalah kewajiban untuk memberi perlakuan atas produk impor dan produk domestik atau prinsip “national treatment” sebagaimana diatur Pasal III GATT tidak harus diikuti secara

---

<sup>16</sup> Bernard Hoekman, cs (editors), *Development, Trade and the WTO*, The World Bank, Washington DC, 2002, hlm. 221.

ketat dalam hal perdagangan jasa. Dalam hal perdagangan jasa para anggota dapat memberi proteksi terhadap industri jasa domestik dan memberi perlakuan yang berbeda terhadap penyelenggara industri jasa dari Negara lain. Sebagaimana dikatakan oleh Peter van den Bossche sebagai berikut :

“... for trade in goods, the national treatment obligation has general application to all trade. On the contrary, the national treatment obligation for trade in services does not have such general application; it does not apply generally to all measures affecting trade in services. The national treatment obligation applies to the extent that WTO Members have explicitly committed themselves to grant national-treatment in respect on specific service sector.”<sup>17</sup>

Pengaturan hak-khusus Negara-negara sedang berkembang anggota WTO berdasar GATS diatur dalam pembukaan dan beberapa pasal GATS. Dalam pembukaan GATS dinyatakan pengakuan atas kebutuhan istimewa bagi Negara-negara sedang berkembang untuk mengatur atau memperkenalkan peraturan baru tentang penyediaan jasa-jasa dalam wilayahnya sebagai upaya untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan, dan berkeinginan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi Negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan di bidang jasa dan perluasan ekspor mereka di bidang jasa, antara lain melalui perkuatan kapasitas domestik. Selanjutnya perlakuan khusus dan fleksibilitas GATS untuk kepentingan Negara-negara sedang berkembang diatur dalam berbagai pasal GATS sebagai berikut :

1. Pasal III ayat 4 GATS memberi perlakuan khusus kepada Negara-negara anggota berkaitan dengan fleksibilitas yang tepat tentang batas waktu dalam menjawab

---

<sup>17</sup> Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005 Hlm. 365

(merespon) setiap permintaan (request) dari anggota lainnya, yang mestinya harus direspon sesegera mungkin.

2. Pasal IV GATS di bawah judul *Increasing Participation of Developing Countries* menentukan sebagai berikut :

1. The increasing Participation of Developing Country Members in world trade shall be facilitate through negotiated specific commitments, by differents Members pursuant Part III sand IV of this Agreement, relating to :
  - a) The strengthening of their domestic services capacity and its efficientcy and competitiveness, inter alia, through acces to technology on a commercial basis,
  - b) The improvement of their access to distribution channels and information networks, and
  - c) The liberalization of market access in sector and modes of supply of export interest to them.
2. Developed country Members, and to the extent possible other Members, shall establish contact points within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement to facilitate the access of developing county Members' services suppliers to information , related to their respective markets, concerning :
  - a) Commercial and technical aspects of the supply of services,
  - b) Registration, recognition and obtaining of professional qualifications,
  - c) The availability of services technology.
- 3). Special priority shall be given to the least-developed country Members in the implementation of pharagraph 1 and 2.

Pasal 4 GATS tersebut menyangkut negosiasi untuk membuat komitmen khusus dengan tujuan meningkatkan partisipasi Negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan jasa. Negara-negara maju juga wajib memberi informasi kepada supplier jasa dari Negara-negara sedang berkembang dan Negara-negara sedang berkembang berkaitan dengan aspek komersial dan teknis penyediaan jasa, pendaftaran, pengakuan dan perolehan kualifikasi professional (sertifikasi profesi) dan ketersediaan teknologi jasa. Dalam hal tersebut Negara-negara tertinggal harus diprioritaskan.

3. Pasal V GATS mengatur perlakuan khusus bagi Negara-negara sedang berkembang dalam hal persyaratan suatu anggota WTO menjadi anggota persetujuan liberalisasi jasa yang dibuat antar anggota tertentu, di mana dalam hal persyaratan tersebut Negara sedang berkembang menikmati fleksibilitas.
4. Pasal XV GATS mengatur tentang pengecualian bagi kepentingan program pembangunan negara-negara sedang berkembang dalam negosiasi tentang pemberian subsidi di bidang perdagangan jasa, yang prinsipnya bahwa subsidi dalam hal tersebut harus dihindari.
5. Pasal XIX ayat 2 GATS antara lain menentukan bahwa harus ada fleksibilitas yang tepat untuk Negara sedang berkembang anggota WTO, yakni untuk membuka sector jasa yang lebih sedikit, liberalisasi yang lebih sedikit dalam hal jenis transaksi, perluasan akses pasar secara progresif dalam kerangka pembangunan ekonomi mereka dan ketika membuka akses pasar mereka bagi supplier jasa dari luar negeri.
6. Selanjutnya dalam Annex on Telecommunication hak-hak khusus dalam perdagangan jasa telekomunikasi juga diberikan kepada Negara-negara sedang

berkembang antara lain berkaitan dengan tingkat pembangunan Negara tersebut serta berkaitan dengan upaya memperkuat pembangunan telekomunikasi Negara-negara sedang berkembang sebagai sektor layanan public dan dalam kaitannya dengan program pembangunan organisasi internasional seperti the International Telecommunication Union, Program Pembangunan PBB dan Bank Dunia.<sup>18</sup>

Seperti disebut di atas Negara-negara sedang berkembang dapat memanfaatkan fleksibilitas pengaturan perdagangan jasa berdasar GATS untuk menghindarkan diri dari kerugian-kerugian akibat perdagangan bebas di bidang jasa. Fleksibilitas-fleksibilitas tersebut antara lain dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Negara anggota WTO mempunyai hak untuk menetapkan suatu daftar di bidang mana saja yang dibuka untuk berkompetisi dengan Negara-negara asing,
2. Banyak jasa layanan publik yang tidak tunduk pada aturan GATS,
3. Monopoli usaha perdagangan jasa atau pembatasan perdagangan jasa kepada pihak asing dapat dipertahankan kepada Negara anggota WTO jika dipandang perlu untuk menjadi safeguard terhadap jasa layanan publik.
4. GATS tidak membatasi pemerintah Negara anggota WTO dalam hal membuat ketentuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti dalam hal menjamin ketersediaan, kualitas dan keterjangkauan dari konsumen terhadap jasa-jasa yang berhubungan dengan kepentingan public,
5. Jika anggota WTO memutuskan untuk membuat komitmen untuk tunduk pada GATS, Negara tersebut masih bebas untuk menentukan sejauh mana mereka

---

<sup>18</sup> Annex on Telecommunication para 5 (g) dan para. 6 (a) dan (c).



tunduk ke sector tertentu yang mereka pilih tersebut, asalkan tetap konsisten dengan kebijakan WTO yang sah.<sup>19</sup>

Para anggota WTO juga menyadari bahwa banyak sektor jasa tertentu sangat berkaitan erat dengan kepentingan umum, sehingga pemerintah sangat berkepentingan untuk memperhatikannya, bila perlu melakukan proteksi, demi terjaminnya ketersediaan jasa tersebut dengan mutu yang bagus. Oleh karena itu GATS memberi banyak kemudahan berkaitan dengan jasa-jasa layanan publik. Dalam hal jasa layanan publik ini para anggota WTO bebas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyediakan akses jasa layanan publik hanya untuk perusahaan domestic saja,
2. membuka jasa layanan publik, baik kepada perusahaan domestic maupun terhadap perusahaan asing tanpa perlu melakukan komitmen untuk tunduk pada ketentuan GATS, bahkan boleh tetap mempertahankan monopoli baik oleh Negara maupun swasta terhadap perdagangan jasa yang menyangkut jasa layanan public,
3. membuat komitmen terhadap GATS untuk perusahaan asing yang menyediakan jasa layanan public hanya sebagai tambahan terhadap supplier domestic,
4. Negara-negara anggota WTO tetap bebas untuk menetapkan tingkat kualitas, safety, harga ataupun setiap kebijaksanaan lainnya yang diperlukan.<sup>20</sup>

Meskipun pada prinsipnya GATS mengandung banyak fleksibilitas dan setiap Negara anggota punya kebebasan untuk menentukan sektor jasa apa saja Negara tersebut akan ikut liberalisasi berdasar GATT, sekali suatu Negara anggota telah menyatakan sepakat untuk meliberalkan bidang jasa tertentu, Negara tersebut dilarang untuk :

<sup>19</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>20</sup> Ibid.

1. melakukan pembatasan terhadap jumlah perdagangan jasa dalam bentuk-bentuk *numerical quota*, monopoli, penyediaan jasa eksklusif, atau persyaratan dilakukan tes kebutuhan ekonomi (economic needs test),
2. melakukan pembatasan terhadap total nilai transaksi jasa atau asset dalam bentuk *numerical quota* atau persyaratan dilakukan terhadap kebutuhan ekonomi,
3. melakukan pembatasan terhadap total nilai transaksi jasa atau jumlah output jasa dalam bentuk *numerical quota* atau persyaratan dilakukan tes kebutuhan ekonomi,
4. melakukan pembatasan terhadap total jumlah orang perorangan yang dapat dipekerjakan dalam sector jasa tertentudalam bentuk *numerical quota* atau persyaratan dilakukan tes kebutuhan ekonomi,
5. membatasi atau memberlakukan hanya untuk tipe tertentu dari suatu badan hukum atau perusahaan penanam modal asing melalui perusahaan mana pihak supplier memperdagangkan jasanya,
6. melakukan pembatasan partisipasi dari modal asing dalam bentuk pembatasan presentase maksimum dari pemegang saham asing atau pembatasan terhadap jumlah nilai atau jumlah individu atau jumlah modal asing,
7. membedakan persyaratan yang mengakibatkan pembatasan perdagangan jasa bagi satu anggota terhadap anggota WTO lainnya.<sup>21</sup>

#### **D. Pemanfaatan special rights GATS dalam kebijakan perdagangan jasa Indonesia**

Sebagai anggota WTO Indonesia punya kewajiban untuk melaksanakan seluruh ketentuan WTO yang mengikat Indonesia. Di bidang hukum Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang baru untuk menyesuaikan dengan

---

<sup>21</sup> Lihat Fuady Munir, *ibid*, hlm. 90.

ketentuan-ketentuan WTO. Sebagaimana telah disebutkan di muka Indonesia telah memperbaharui berbagai undang-undang Hak Milik Intelektual dan Undang Undang Perbankan dan Undang Undang Penanaman Modal. Dalam berbagai undang-undang tersebut nampak bahwa semangat liberalisme nampak menonjol dan Indonesia sebagai Negara sedang berkembang tidak memanfaatkan ketentuan-ketentuan khusus dalam persetujuan WTO yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Sebagai contoh Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang terlalu kuat melindungi kepentingan pemegang hak dan tidak mengatur secara baik kewajiban-kewajiban pemegang hak kepada masyarakat, termasuk kewajiban untuk melakukan alih teknologi. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang memberi perlakuan sama antara penanam modal asing dan penanam modal nasional akan memberi peluang yang lebar bagi persaingan bebas di bidang investasi, sehingga kurang memberi proteksi kepada investor lokal.

Demikian pula di bidang perdagangan jasa, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perdagangan sektor jasa sebagai pelaksanaan GATS. Dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang antusias untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan WTO termasuk GATS. Mahendra Siregar, SE, MSc, Deputy Bidang Koordinator Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, dalam Seminar Liberalisasi Bidang Jasa di Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2007, menyatakan bahwa sektor jasa memiliki peranan yang signifikan dalam perekonomian nasional yang berhubungan erat dengan produksi

barang. Oleh karena itu Indonesia memandang penting terhadap setiap perundingan internasional baik bilateral, plurilateral maupun multilateral di bidang perdagangan jasa.<sup>22</sup>

Sebetulnya liberalisasi perdagangan jasa merupakan bidang yang cukup alot dalam rangka pelaksanaan persetujuan WTO mengingat perbedaan kepentingan Negara-negara maju dengan Negara-negara sedang berkembang. Banyak Negara sedang berkembang yang tidak bersedia melakukan penawaran (offer) yang bernilai ekonomis. Pemerintah Negara-negara anggota GATS (WTO) sepakat untuk melakukan negosiasi tentang masalah-masalah khusus dan sepakat untuk memasuki putaran perundingan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang progresif di bidang jasa. Putaran perundingan tersebut telah dimulai kurang dari lima tahun sejak dibentuknya WTO. Secara resmi perundingan di bidang jasa dimulai awal tahun 2000 di bawah Dewan WTO untuk Perdagangan Jasa.

Pada bulan Maret tahun 2001, Dewan WTO untuk Perdagangan Jasa tersebut memenuhi unsur kunci mandat negosiasi melalui pembentukan pedoman dan prosedur negosiasi (negotiating guideline and procedure). Melalui Deklarasi Doha, apa yang telah dihasilkan tersebut disahkan dan diperkuat, serta dibentuk unsure-unsur kunci penetapan jangka waktu (timetable), meliputi yang sangat penting adalah batas akhir dari penutupan negosiasi sebagai satu target yang harus diambil (dengan batas waktu tanggal 1 Januari 2005).<sup>23</sup>

Beberapa permintaan kolektif untuk pembukaan pasar jasa telah dimulai pada bulan Februari tahun 2005. Kemudian melalui Konferensi Tingkat Menteri di Hongkong bulan Desember tahun 2005, model perundingan menggunakan model *request offer* di

---

<sup>22</sup> Dari Seminar Pemanfaatan Liberalisasi Jasa , Yogyakarta, 30 Agustus 2007.

<sup>23</sup> WTO, The Doha Declaration Explained, <http://www.wto.org>, 18 Februari 2003, hlm.4

mana satu Negara mengajukan daftar permintaan (request) kepada satu Negara lainnya secara bilateral, mulai menggunakan metode perundingan plurilateral. Perundingan ini mirip dengan metode request dan offer tetap, di mana kelompok Negara meminta kelompok Negara lainnya.<sup>24</sup>

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO telah aktif dalam perundingan perdagangan jasa. Indonesia telah mendaftarkan komitmennya (Schedule of Commitments) pada Sekretariat WTO dan komitmen tersebut telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1995. Dalam rangka implementasi kesepakatan tersebut, Indonesia juga telah menandatangani "Second Protocol to the GATS" tanggal 3 Juli 1996.

Sejak perundingan Putaran Doha tahun 2000 telah diputuskan bahwa GATS mencakup 12 bidang jasa, termasuk pendidikan. Pada putaran Hongkong tahun 2005, masing-masing Negara anggota diminta untuk menawarkan atau melakukan offering sektor-sektor yang akan diliberalkan. Indonesia semula menawarkan 5 sektor jasa, yaitu konstruksi, telekomunikasi, bisnis, angkutan laut, pariwisata dan keuangan. Namun oleh Australia, Malaysia, Jepang, Selandia Baru, Cina Taipeh dan Amerika Serikat, Indonesia juga diminta untuk meliberalkan jasa pendidikan. Oleh karena itu dalam Putaran Hongkong Indonesia juga telah memasukkan sektor jasa pendidikan untuk diliberalisasikan di bawah GATT, yang meliputi jasa-jasa pendidikan sebagai berikut :

1. pendidikan menengah teknikal dan vokasional,
2. jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional,
3. jasa pendidikan tinggi,
4. jasa pelatihan dan kursus bahasa,
5. jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur.

---

<sup>24</sup> Ibid.

Berkaitan dengan liberalisasi perdagangan jasa berdasar GATS tersebut Indonesia perlu memanfaatkan ketentuan-ketentuan khusus yang menguntungkan serta berbagai fleksibilitas GATS guna melindungi supplier jasa lokal. Namun hingga sekarang pemerintah Indonesia dapat dikatakan belum mengeluarkan suatu kebijakan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa. Sebagai contoh, meskipun telah banyak masukan untuk melakukan berbagai pembatasan sejauh dimungkinkan berdasar GATS dalam hal liberalisasi jasa pendidikan namun hingga sekarang belum ada kebijakan pemerintah di bidang itu. Banyak pakar ekonomi dan perdagangan internasional mengusulkan agar liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai pembatasan, seperti misalnya supplier jasa pendidikan asing yang masuk ke Indonesia harus bekerjasama dengan supplier jasa pendidikan lokal, menggunakan mayoritas tenaga kerja local, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Indonesia, serta supplier jasa pendidikan dari luar negeri hanya diijinkan beroperasi di kota-kota tertentu. Dalam kenyataannya masukan dari para ahli tersebut belum dilaksanakan melalui produk aturan perundangan Indonesia. Memang berdasar Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2007 supplier jasa pendidikan asing yang beroperasi di Indonesia telah dibatasi modalnya, yakni maksimum 49 % dan sisanya dipegang oleh pihak Indonesia. Namun ketentuan tersebut belum menyeluruh dan baru secara partial.

Dalam bidang lain, yakni dalam hal jasa keuangan (Bank) ketentuan hukum di Indonesia telah memuat pembatasan-pembatasan. Dalam ketentuan yang berlaku secara umum untuk seluruh sektor yang ditawarkan dalam Schedule of Commitments Indonesia dicantumkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mendirikan satuan usaha (Commercial Presence) di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha patungan dan atau kantor

perwakilan, kecuali ditentukan lain. Badan usaha tersebut harus memenuhi syarat :

- a) Harus berbentuk Perseroan Terbatas,
  - b) Kepemilikan saham pihak asing pada PT tersebut maksimal 49 %
2. Untuk pembayaran pajak non residen dikenakan pajak 20% atas pendapatan bunga , royalty, deviden dan pembayaran yang diterima dari jasa yang dilakukan di Indonesia,
  3. Pihak asing tidak boleh menguasai tanah berdasar Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. Perusahaan patungan boleh menguasai tanah berdasar Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan serta menyewa tanah dan property,
  4. Setiap badan hokum dan individual harus memenuhi persyaratan kualifikasi professional,
  5. Yang boleh bekerja di Indonesia adalah direktur, manajer dan tenaga ahli atau penasihat teknis , kecuali ditentukan lain. Mereka boleh tinggal di Indonesia selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.
  6. Setiap orang asing yang bekerja di sector jasa dikenakan pajak yang dikenakan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan daerah.
  7. Setiap orang asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki ijin dari Departemen Tenaga Kerja,
  8. Setiap orang asing yang masuk wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dan prosedur keimigrasian.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Bismar Nasution, *Peraturan tentang Jasa di Bidang Keuangan (Bank, Non-Bank) Pasca GATT-GATS/WTO Dalam Kaitannya dengan Ketentuan Perdagangan di Indonesia*, makalah disampaikan dalam

Dari uraian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa kebijakan dagang Indonesia berkaitan dengan liberalisasi perdagangan jasa di bawah GATS belum memanfaatkan secara maksimal ketentuan-ketentuan *special rights* Negara-negara sedang berkembang dan fleksibilitas GATS. Kebijakan dagang Indonesia di sektor tersebut terlalu mengikuti prinsip-prinsip GATS/WTO yang sebenarnya sebagai Negara sedang berkembang Indonesia dapat melakukan penyimpangan sejauh dimungkinkan berdasar persetujuan tersebut.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa GATS mengatur *special rights* dan berbagai fleksibilitas yang banyak ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi Negara-negara sedang berkembang anggota WTO. Hal ini diperlukan mengingat kemampuan teknologi dan daya saing industri jasa Negara-negara sedang berkembang jauh tertinggal dari Negara-negara maju. Diharapkan pengaturan *special rights* dan fleksibilitas dapat dimanfaatkan Negara-negara sedang berkembang anggota WTO, sehingga liberalisasi perdagangan jasa berdasar GATS akan dapat memberi keuntungan ekonomis baik bagi Negara-negara maju maupun negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

Indonesia sebagai Negara anggota WTO memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan WTO, termasuk GATS. Indonesia telah menyatakan komitmennya sejak tahun 1995 dan Indonesia telah ikut serta dalam kesepakatan liberalisasi perdagangan jasa-jasa hasil perundingan WTO di Hongkong Desember tahun 2005. Sebagai Negara sedang berkembang anggota WTO, Indonesia belum banyak memanfaatkan *special rights* dan fleksibilitas GATS yang khusus ditujukan bagi kepentingan Negara-negara sedang berkembang anggota WTO.

## B. Saran

1. Indonesia perlu membuat aturan pelaksanaan tentang pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa, khususnya jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan kepentingan umum (public services).
2. Dalam pembuatan kebijakan dagang sebagai pelaksanaan liberalisasi perdagangan jasa, pemerintah Indonesia hendaknya memanfaatkan semaksimal mungkin *special rights* dan fleksibilitas GATS yang diperuntukkan bagi Negara-negara sedang berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernard. Hoekman, cs., editors, *Development, Trade and the WTO*, The World Bank, Washington, DC, 2002.
- Huala, Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Jackson, John., *Legal Problems of International Economic Relations*, Cases, Materials and Text, West Publishing. Co, St. Paul, Minn., 1995
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2004.
- Nasution, Bismar, *Peraturan tentang Jasa di Bidang Keuangan (Bank dan non-Bank) Pasca GATT-GATS/WTO dalam Kaitannya dengan Ketentuan perdagangan di Indonesia*, makalah, Fakultas Hukum USU, Medan, 1999.
- Oentoeng Suropati, *Hukum Dagang Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Press, Salatiga, 1999.
- Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge University Press, 2005.
- Sofian Effendi, *GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, Makalah Diskusi BEM KM UGM, Yogyakarta, 22 September 2005.
- Triyana Yohanes, *Liberalisasi Ekonomi Dunia, Pembangunan dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Justitia et Pax, Vol. 26 No. 2. , Desember 2006.

-----, *Pengaturan Special Rights Negara Negara Sedang Berkembang Dalam Persetujuan WTO*, Laporan Penelitian, Juli 2006.

Verwey, WD, *The Preferential Status of developing Countries in International Trade Law After the Uruguay Round*, Makalah tidak dipublikasikan.

